



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAFRIADI
2. Jabatan : DIREKTUR SISTEM MANAJEMEN INVESTASI
3. NHK : 192917

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.870.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/145 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah Seluas 329 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 372.857.450**

1. MOTOR, HONDA CUB Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.350.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.400.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
4. LAINNYA, THRILL RAVAGE Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 6.230.500
5. LAINNYA, THRILL VANQUISH Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.758.200
6. LAINNYA, POLICE CALIFORNIA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.918.750
7. LAINNYA, ELEMENT ECOSMO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.375.000
8. MOTOR, HONDA SKUTIK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.



17.820.000

9. MOTOR, HONDA SKUTIK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

21.005.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 135.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 308.763.178**F. HARTA LAINNYA** Rp. 70.000.000**Sub Total** Rp. 2.756.620.628**III. HUTANG** Rp. 173.288.884**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.583.331.744

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.